**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN PROPOSISI**

* 1. **Kajian Pustaka**

Kajian Pustaka merupakan suatu proses penelaahan atau pengkajian terhadap berbagai literatur atau sumber kepustakaan yang diarahkan untuk menemukan pegangan atau landasan teoritik yang kuat serta memiliki kebenaran yang tinggi. Kajian Pustaka juga menelaah relevansi antara literatur yang dikaji dengan masalah atau fokus penelitian yang akan diteliti. Maka, dalam melakukan kajian pustaka perlu juga diperhatikan tingkat *validitas* dan *realibitas* literatur tersebut, sehingga diharapkan dapat menemukan literatur yang benar-benar berkualitas sesuai fokus penelitian.

**2.1.1** **Konsep Kebijakan**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi,dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

**Carl J Friedrich** sebagaimana dikutip oleh **Agustino (2014:7)** dalam bukunya dasar-dasar kebijakan publik mendefinisikan bahwa:

**“Kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatam terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu”.**

**2.1.2 Kebijakan Publik**

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/ walikota.

Secara terminologi pengertian kebijakan publik (*public policy*) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Kebijakan publik adalah satu studi yang hingga saat ini masih menarik untuk dikaji secara mendalam. Studi kebijakan publik umumnya fokus pada perumusan kebijakan, implementasi dan evaluasi kebijakan. Kebijakan publik adalah suatu otoritas yang dimiliki negara yang bertujuan untuk mengatur kehidupan di dalam negara. **Thomas R. Dye** yang dikutip **oleh Nugroho (2014:126)** dalam bukunya *public policy* mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah ***“Whatever government choose to do or not to do.”*** **(Kebijakan Publik adalah apapun yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.)**

Senada dengan **Dye, Anderson** yang dikutip **Nugroho (2014:125)** bukunya *pubic policy* menjelaskan bahwa

***“……… A purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter concern.”* (serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah).**

Menurut **Nugroho (2014)** dalam bukunya *public policy* ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu:

1. **Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional**
2. **Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukuranya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh.**

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang beroriental pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah politik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

* + 1. **Pengertian Implementasi**

Bertitik tolak pada latar belakang dan perumusan masalah, peneliti menggunakan kerangka pemikiran yang dapat dijadikan landasan teori berupa pendapat dari para ahli yang menjadi kajian dalam penelitian yakni Implementasi Kebijakan Pengelolaan Retribusi Parkir.

Menurut Nurdin **Usman (Usman, 2002:70)** mengemukakan:

**“Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan bersama”**

Pada dasarnya, kebijakan dibuat karena adanya suatu permasalahan, untuk menyelesaikan permasalahan itu harus mengimplementasikan kebijakan dalam bentuk kegiatan dengan mengikuti sesuai prosedur yang ada untuk mencapai suatu tujuan.

Sedangkan menurut **Guntur Setiawan (2004)** mengemukakan:

**“Implementasi merupakan perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan serta tindakan dengan tujuan untuk menggapainya diperlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif”**

Implementasi merupakan kegiatan yang berhubungan dengan interaksi atau komunikasi yang saling mempengaruhi, karena tanpa adanya komunikasi, kegiatan untuk mencapai tujuan tidak akan tercapai dan dalam melaksanakan suatu kebijakan tidak akan berjalan secara optimal.

**2.1.4 Implementasi Kebijakan**

Menurut **Thoha (2008:108)** mengemukakan:

**“Kebijakan publik mengatur banyak hal mulai dari perilaku, mengorganisasikan birokrasi, mendistribusikan penghargaan sampai penarikan pajak dari masyarakat”.**

Menurut **Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2006:139)** mendefinisikan:

**Implementasi Kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.**

Sedangkan menurut **Edward III (1980:1)** dalam buku **Iwan Satibi (2011:167)** mengemukakan bahwa:

**“Policy implementations...is the stage of policy making between the establishment of a policy ... and the concequences of the policy for people whom is affects”.**

Bahwa implementasi kebijakan merupakan pelaksana dari suatu program yang ditujukan untuk mencapai tujuan dari kebijakan. Implementasi kebijakan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakam suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi berbagai kepentingan.

**2.1.5 Model Implementasi Kebijakan menurut para Ahli**

Perkembangan studi implementasi kebijakan telah memasuki generasi ketiga, dimana generasi pertama memperkenalkan pendekatan *top-down.* Pendekatan yang mengasumsikan bahwa implementasi kebijakan dimulai dengan keputusan yang dibuat oleh pemerintah sehingga pelaksanaannya pun bersifat tersentralisasi. Pendekatan *top-down* bertitik tolak dari perspektif bahwa keputusan-keputusan atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh aktor pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh para aparatur, administratur atau birokrat di semua tingkatan terutama pada tingkatan bawah. Fokus analisis implementasi kebijakan pada pendekatan top-down berkisar pada masalah-masalah pencapaian tujuan formal kebijakan yang telah ditentukan.

Generasi kedua perkembangan teori implementasi kebijakan memperkenalkan pendekatan *bottom-up* atau dalam istilah Lester & Stewart Jr. (2000:108) dinamakan *the market approach* (pendekatan pasar) sebagai respon atas pendekatan *top-down*. Bahwa untuk menyelesaikan masalah publik sebaiknya dimulai dari “bawah” yang mengenal dan memahami konteks maslaah yang dirasakan oleh mereka.

Generasi ketiga, memperkenalkan pendekatan hibrid atau pendekatan campuran (antara pendekatan *top-down* dengan pendekatan *bottom-up*). Pendekatan ini untuk mengatasi kelemahan konseptual perdebatan dua kutub antara pendukung pendekatan top-down dengan pendukung pendekatan bottom-up. Pendekataan ini juga menumpukan perhatian pada argumen empiris tentang konseptualisasi yang tepat mengenai proses implementasi dan secara pragmatis meramu argumen-argumen ekstrim dari kedua belah pendekatan menjadi model yang mengakui kemudi pusat dan otonomi daerah.

Model-model implementasi kebijakan publik, seperti:

1. Donald Van Metter & Carl Van Horn

Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performasi dari suatu pelaksanaan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan dengan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik, yaitu:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan,
2. Sumber Daya,
3. Karakteristik agen pelaksana,
4. Sikap atau kecenderungan para pelaksana,
5. Komunikasi antar-organisasi dan aktivitas pelaksana
6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik.
7. George C. Edward III

Model implementasi yang berperspektif top-down dikembangkan oleh Edward III dengan menamakan model implementasi kebijakan publik dengan istilah *Direct and Indirect Impact on Implementation.* Terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi,
2. Sumber Daya,
3. Disposisi
4. Struktur birokrasi.
5. Marilee S. Gridle

Pendekatannya dikenal dengan nama *Implementation as A Political and Administrative Process*. Menurut Grindle keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian *outcomes* (yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih). Keberhasilan suatu implementasi kabijakan publik menurut Grindle juga amat ditentukan oleh tingkat *implementability* yang terdiri dari:

1. *Content of Policy*
2. *Context of Policy*
3. Daniel H. Mazmanian & Paul A. Sabatier

Model implementasi ini disebut dengan *A Frame for Policy Implementation Analysis*. Kebijakan publik adalah kemampuannya dalam mengidentifikasikan variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Diklasifikasikan menjadi tiga kategori besar, yaitu:

1. Mudah atau tidaknya masalah yang akan digarap
2. Tingkat dan Ruang lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki.
3. Kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi secara tepat.
4. Yang Variabel-variabel di luar undang-undang yang mempengaruhi implementasi.
5. Thomas R. Dye

Model implementasi kebijakan dari Dye sering disebut juga dengan istilah “Model Implementasi Interaktif”. Model ini menganggap pelaksanaan kebijakan sebagai proses yang dinamis, karena setiap pihak yang terlibat dapat mengusulkan perubahan dalam berbagai tahap pelaksanaan. Hal itu dilakukan ketika program dianggap kurang memenuhi harapan *stakeholders*. Ini berarti bahwa berbagai tahap implementasi program atau kebijakan publik akan dianalisis dan dievaluasi setiap fase pelaksanaannya diketahui dan segera diperbaiki untuk mencapai tujuan.

Input sumber daya dapat digunakan secara optimum jika dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan terjadi interaksi positif dan dinamis antara pengambilan kebijakan, pelaksanaan kebijakan (masyarakat) dalam suasana dan lingkungan yang kondusif.

1. Charles O. Jones

Menurut Jones (1996:296) buku Agustino (2017:154) dalam melaksanakan aktivitas implementasi program atau pelaksanaan kebijakan, terdapat tiga macam aktivitas yang perlu diperhatikan secara saksama, yakni:

1. Organisasi : pembentukan atau penataan ulang sumber daya, unit dan metode agar kebijakan dapat memberikan hasil atau dampak.
2. Interpretasi : menafsirkan bahasa kebijakan menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.
3. Penerapan : ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.
   * 1. **Faktor Penentu Implementasi Kebijakan**

Kebijakan dapat bersifat membujuk orang supaya bertindak sesuai dengan aturan atau tujuan yang diharapkan oleh kebijakan tersebut termasuk apakah kebijakan tersebut berkenaan dengan penghargaan terhadap hak paten, perizinan untuk membuka lahan guna pembangunan perumahan atau penerimaan anggaran negara.

Implementasi kebijakan dianggap tidak efektif apabila tujuan kebijakan tidak dapat dipenuhi, jika orang-orang tetap bertindak dengan cara yang tidak diinginkan oleh maksud kebijakan, jika subjek kebijakan tidak dapat dipenuhi, jika orang-orang tqetap bertindak dengan cara yang tidak diinginkan oleh maksud kebijakan, ataupun jika subjek kebijakan berhenti mengerjakan apa yang ditentukan. Ada beberapa hal yang mengakibatkan satu implementasi kebijakan dikatakan efektif atau tidak.

1. Respek anggota Masyarakat pada Otoritas dan Keputusan Pemerintah

Kodrat manusia, bila merujuk pada filsafat politik John Locke, dikatakan memiliki state of nature yang positif. Ini artinya, manusia dapat menerima dengan baik hubungan relasional antar-individu. Ketika relasi ini berjalan dengan baik, maka logikanya seluruh warga akan saling hormat-menghormati, memberikan respek pada (otoritas) orangtua, memberikan penghargaan yang tinggi pada ilmu dan pengetahuan, menghormati undang-undang yang dibuat oleh pemerintah, mematuhi aturan hukum, mempercayai pejabat-pejabat pemerintah, mematuhi aturan hukum, mempercayai pejabat-pejabat pemerintah dan sebagainya.

Kepatuhan-kepatuhan ini akan terus berlangsung selama individu dalam masyarakat tersebut masih menganggap masih cukup banyak alasan dan argumen untuk menghormati kepatuhan-kepatuhan itu. Dalam arti kata lain, memang manusia (secara kodrati) secara moral menyadari bahwa perundnagan dan hukum harus mereka patuhi sebagai suatu hal yang benar dan baik. Dalam hal ini , faktor penentu keefektifan pelaksanaan kebijakan didasarkan atas penghormatan dan penghargaan publik pada pemerintah yang legitimat. Ini merupakan kata kunci penting bagi terwujudnya pemenuhan atas pengejawantahan kebijakan publik. Apabila publik menghormati pemerintah yang berkuasa oleh karena legitimasinya, maka secara otomatis mereka akan turut memenuhi ajakan pemerintah melalui berbagai bentuk kebijakan.

1. Kesadaran untuk menerima kebijakan

Dalam masyarakat yang digerakkan oleh logika rational choices (pilihan-pilihan rasional), banyak dijumpai individu atau kelompok warga yang mau menerima dan melaksanakan kebijakan publik sebagai sesuatu yang logis, rasional serta memang dirasa perlu. Namun, di sisi lain, terdapat individu atau kelompok yang juga tidak suka membayar pajak, apalagi dalam kondisi perekonomian yang tengah melemah; tetapi jika individu atau kelompok tersebut percaya bahwa dengan membayar pajak dapat memberikan kontribusi atas perbaikan perekonomian bangsa, maka individu atau kelompok tadi akan secara sadar untuk membayar pajak. Tetapi hal itu tidak mudah. Ini karena bermain ranah “kesadaran” publik merupakan hal yang sulit sebab pemerintah perlu merubah *mindset* warga.

1. Ada atau tidaknya sanksi hukum

Faktor penentu lainnya agar implementasi kebijakan dapat berjalan efektif adalah sanksi hukum. Orang akan melaksanakan dan menjalankan suatu kebijakan (kendati dengan perasaan terpaksa) karena mereka takut terkena dampak sanksi hukum yang dijabarkan oleh konten suatu kebijakan seperti denda, kurungan dan sanksi lainnya. Oleh karena itu, salah satu strategi yang sering digunakan oleh pembuat kebijakan agar subjek kebijakan menjalankan arahan kebijakan, maka sanksi hukum dihadirkan pada setiap kebijakan yang dibuatnya. Selain itu, subjek kebijakan seringkali mematuhi dan melaksanakan suatu aturan perundangan karena ia tidak suka dikatakan sebagai orang yang melanggar aturan hukum sehingga dengan terpaksa orang yang melanggar aturan hukum sehingga dengan terpaksa mereka melakukan apa yang diarahkan oleh kebijakan tersebut.

1. Kepentingan Pribadi atau Kelompok

Subjek kebijakan (individu maupun kelompok) sering memperoleh keuntungan langsung dari suatu pelaksanaan kebijakan. Maka tidak heran apabila efektifitas suatu implementasi kebijakan ikut dipengaruhi oleh penerimaan dan dukungan subjek kebijakan atas pelaksanaan suatu kebijakan.

1. Bertentangan dengan sistem nilai yang ada

Implementasi kebijakan pun dapat berjalan tidak efektif apabila bertentangan dengan sistem nilai yang ada di suatu daerah.

1. Keanggotaan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi

Kepatuhan atau ketidakpatuhan seseorang atau sekelompok orang pada kebijakan dapat disebabkan oleh bergabung atau tidak bergabungnya subjek kebijakan dalam s[uatu organisasi tertentu atau tidak. Jika subjek kebijakan bergabung dalam suatu organisasi yang tengah membela suatu kebijakan, maka secara sadar ia akan mengikuti arah kebijakan organisasi. Tetapi sebaliknya, apabila tujuan organisasi dimasuki oleh subjek kebijakan tersebut bertolak belakang dengan ide dan gagasan organisasinya, maka seargumentatif apapun kebijakan yang sudar diinformasikan pemerintah untuk kepentingan publik akan sulit diterima oleh subjek itu. Dan realitas ini menunjukkan bahwa tidak semua kebijakan daoat berjalan efektif.

1. Wujudnya kepatuhan selektif

Tidak dapat dipungkiri bahwa semua subjek kebijakan patuh atas aturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Ini karena ada sebagian besar masyarakat yang patuh pada suatu kebijakan tertentu, tetapi tidak pada kebijakan lain. Misalnya seorang pedagang kaki lima akan sangat patuh pada aturan lalu lintas jalan raya (ketika ia mengendarai motor); tetapi di sisi lain, ia justru tidak patuh pada kebijakan larangan untuk berdagang di kawasan-kawasan bebas PKL. Aturan pertama dioatuhi atas alasan keselamatan dirinya sedangkan aturan kedua dilanggarnya atas alasan pemenuhan kebutuhan keluarga. Kepatuhan dan ketidakpatuhan inilah yang dimaksud dengan kepatuhan selektif dan ini kondisi juga yang sangat menentukan efektif atau tidak efektif implementasi suatu kebijakan.

1. Waktu

Efektif tidaknya suatu implementasi kebijakan sangat dipengaruhi juga oleh faktor waktu. Sebagai contoh, jika suatu masyarakat memandang suatu kebijakan bertolak belakang dengan kepentingan mereka, maka warga akan berkecenderungan untuk menolak kebijakan tersebut. Tetapi dengan berjalannya waktu, suatu kebijakan yang awalnya ditolak dan (mungkin) dianggap kontroversial bisa berubah menjadi kebijakan yang wajar dan dapat diterima oleh masyarakat.

1. Sosialisasi

Hal berikutnya yang dapat digunakan untuk menilai efektif tidaknya suatu implementasi kebijakan adalah dilaksanakan atau tidaknya sosialisasi. Sosialisasi merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan berbagai hal yang akan dilaksanakan dan ditempuh oleh pemerintah melalui kebijakan yang diformulasikan. Tanpa sosialisasi yang cukup baik, maka tujuan kebijakan bisa jadi tidak tercapai.

1. Koordinasi antar lembaga atau antar organisasi

Implementasi kebijakan tidak jarang melibatkan banyak pemangku kebijakan dan stakeholder. Oleh karena itu, koordinasi merupakan mantra penting dalam menilai keefektifan suatu implementasi kebijakan. Terkadang suatu kebijakan dianggap baik dalam segi konten tapi lemah dalam segi pelaksanaan. Realita ini sangat mungkin terjadi karena koordinasi antar lembaga atau antar organisasi yang seharusnya menjalankan dan atau mengawasi justru tidak melaksanakan koordinasi tersebut. Padahal apabila koordinasi itu dilakukan bukan tidak mungkin suatu masalah publik dapat diselesaikan dengan segera.

* + 1. **Pengertian Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan**

Menurut **Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia (2010)**

**Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan yang proses pengelolaanya , mulai dari permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.**

Pelaksanaan pelayanan yang dilakukan dalam satu tempat, satu tempat ini disini berarti cukup melalui satu meja atau loket pelayanan. Sistem ini memosisikan warga hanya berhubungan dengan petugas meja atau loket pelayanan di kecamatan.

* + 1. **Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran merupakan kerangka untuk mengalirkan jalan pikiran yang logis (*logical construct*). Kerangka pemikiran diarahkan untuk menjawab secara rasional atas masalah yang dirumuskan.

Edwards III dalam buku Leo Agustino (2017:136) mengemukakan model implementasi kebijakan yang dikenal dengan Direct and Indirect Impact on Implementation.Terdapat empat faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu:

1. **Komunikasi**, menurutnya sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus di transmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat, akurat dan konsisten. Komunikasi atau pentransmisian informasi diperlukan agar para pembuat keputusan di dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan di masyarakat.

Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut diatas, yaitu:

1. **Transmisi,** penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal ini disebabkan kareka komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.
2. **Kejelasan,** komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, namun para pelaksana membutuhkan kejelasan informasi dalam melaksanakan kebijakan agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih sesuai konten kebijakan.
3. **Konsistensi,** perintah yang diberikan dalam pelaksanakan suatu komunikasi haruslah konsisten (untuk diterapkan dan dijalankan). Ini karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dilapangan.
4. **Sumber daya,** merupakan hal penting lainnya, menurut **George C. Edward III,** dalam mengimplementasikan kebijakan. Indikator sumber-sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu :
5. **Staf,** sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau sumber daya manusia (SDM). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai ataupun tidak kompeten dibidangnya.
6. **Informasi,** dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai 2 bentuk yaitu **(i)** informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. **(ii)** informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.
7. **Wewenang,** pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan.
8. **Fasilitas,** fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung atau sarana dan prasarana maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.
9. **Disposisi,** adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi menurut **Edward III** adalah:
10. **Efek disposisi,** disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diingankan oleh pejabat-pejabat tinggi.
11. **Melakukan pengaturan birokrasi,** Edward III menyaratkan bahwa implementasi kebijakan harus dilihat juga dalam pengaturan birokrasi. Ini merujuk pada penunjukan dan pengangkatan staf dalam birokrasi yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas, dan kompetensinya. Selain itu pengaturan birokrasi juga bermuara pada “pembentukan” sistem pelayanan publik yang optimal, penilaian personil dalam bekerja, hingga metode *bypassing* personal.
12. **Insentif,** Edward III menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai usaha memenuhi kepentingan pribadi (*self interest*) atau organisasi.
13. **Struktur birokrasi,** birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan kordinasi dengan baik. Dua karakteristik menurut Edward III yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi atau organisasi kearah yang lebih baik adalah :
14. **Membuat standar operating prosedures (SOPs) yang lebih fleksibel**, SOPs adalah suatu prosedur atau aktivitas terencan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan seperti aparatur, administratur atau birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya dalam setiap harinya sesuai dengan standar yang telag ditetapkan.
15. **Melaksanakan fragmentasi,** tujuannya untuk menyebar tanggung jawab berbagai aktivitas, kegiatan atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan terfragmentasinya struktur biroktasi, maka implementasi akan lebih efektif karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel.

Dari pemikiran diatas, baik yang terkait dengan implementasi kebijakan, baik dengan kebijakan PATEN, peneliti berasumsi bahwa ada hubungan/penyelenggaraan PATEN di kecamatan cilengkrang dipengaruhi pelaksana kebijakan KEMENDAGRI. Kerangka pemikiran tersebut tertuang dalam gambar sebagai berikut.

|  |
| --- |
| **INPUT** |
| * Kebijakan PATEN * PERMENDAGRI NO 4 TAHUN 2010 * KEP.MENDAGRI NO 138-230 TAHUN 2010 * Teori Implementasi * Kondisi Pelayanan Kecamatan Cilengkrang * Visi PATEN |

|  |
| --- |
| **PROSES KONVERSI** |
| * Implementasi kebijakan * Paramater implementasi kebijakan edward III * Komunikasi * Sumber daya * Disposisi * Struktur birokrasi |

|  |
| --- |
| **OUTPUT** |
| * Kepuasan masyarakat * Pelayanan publik berkualitas * Mudah * Murah * Cepat * Dan terjangkau |

**TABEL KERANGKA PEMIKIRAN**

**2.1**

* + 1. **Proposisi**

Berdasarkan uraian konsep dan teori yang telah peneliti uraikan pada kerangka pemikiran, maka peneliti merumuskan proposisi bahwa Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung ditentukan oleh komunikasi, sumber daya, disposisi, dan sturktur birokrasi Guna menciptakan implementasi kebijakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan khususnya Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung menjadi optimal.